

TUJUAN 1 : MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN

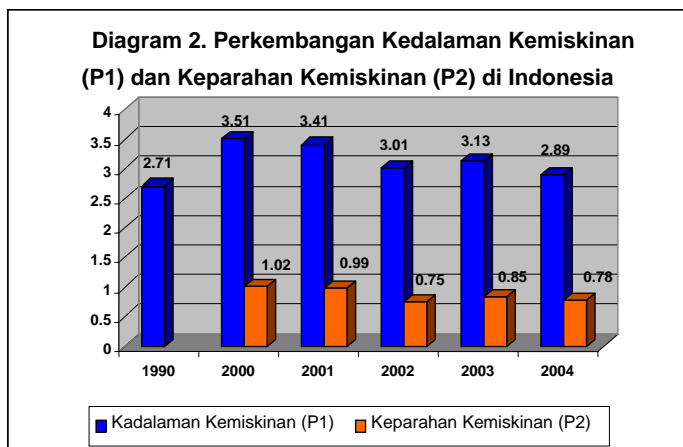
Target 1 : Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya di bawah \$ 1 perhari menjadi setengahnya antara 1990 – 2015

Keadaan dan Kecenderungan Bangsa Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan yang semula meningkat sebagai dampak dari krisis ekonomi pada tahun 1999. Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan nasional turun dari 23,4 persen pada tahun 1999 menjadi 18,2 persen pada tahun 2002 dan 17,4 persen pada 2003, serta menjadi 16,6 persen pada 2004. Sementara itu, jumlah penduduk berdasarkan standar pendapatan kurang dari \$1 perhari juga menurun dari 9,2 persen pada tahun 2001 menjadi 7,2 persen pada tahun 2002.



Sumber : BPS, Berbagai Tahun
Keterangan: Tahun 1996* seterusnya menggunakan kriteria 1998

Penurunan jumlah penduduk miskin tersebut menunjukkan adanya *trend positif untuk mencapai target penurunan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan nasional pada tahun 2015 menjadi sebesar 7,2 persen*. Hal ini harus diupayakan dengan usaha, kerjasama seluruh *stakeholders* dan keberpihakan terhadap si miskin dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia .



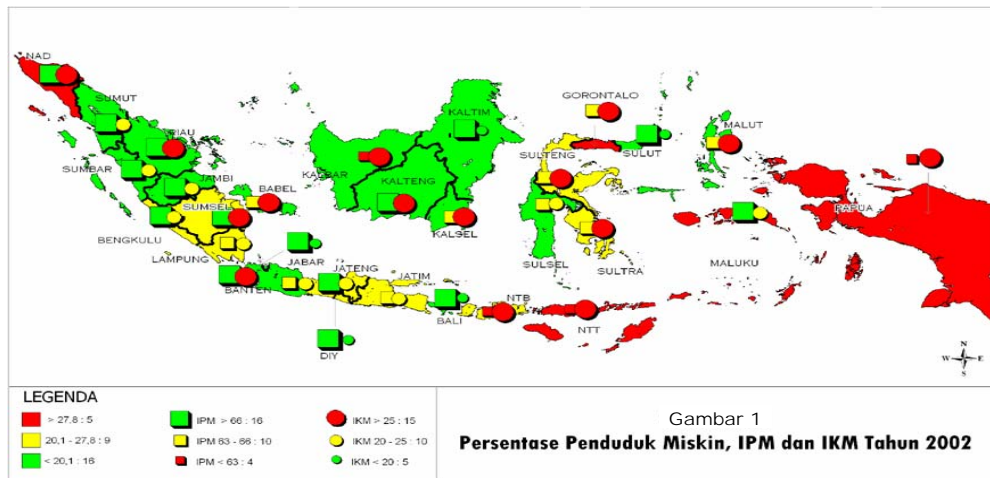
Sumber : BPS, Berbagai Tahun

Selain itu, tingkat kedalaman kemiskinan (P1) di Indonesia yaitu kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, juga cenderung menurun pada 2004 dibanding 2003 dan 2002. Tingkat keparahan kemiskinan (P2) yaitu kesenjangan antarpenduduk miskin juga menurun. Diagram 2 menunjukkan perkembangan tingkat kedalaman (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) selama periode 1999 – 2004.

Tantangan

Masalah kemiskinan di Indonesia juga ditandai oleh rendahnya mutu kehidupan masyarakat. Hal ini dapat ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada tahun 2002 sebesar 0,692, dimana diantara beberapa negara ASEAN masih lebih rendah dari Malaysia dan Thailand. Sementara itu, Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) Indonesia pada tahun 2002 sebesar 0,178 masih lebih tinggi dari Philipina dan Thailand. Selain itu, kesenjangan gender di Indonesia masih relatif lebih besar dibanding negara ASEAN lainnya.

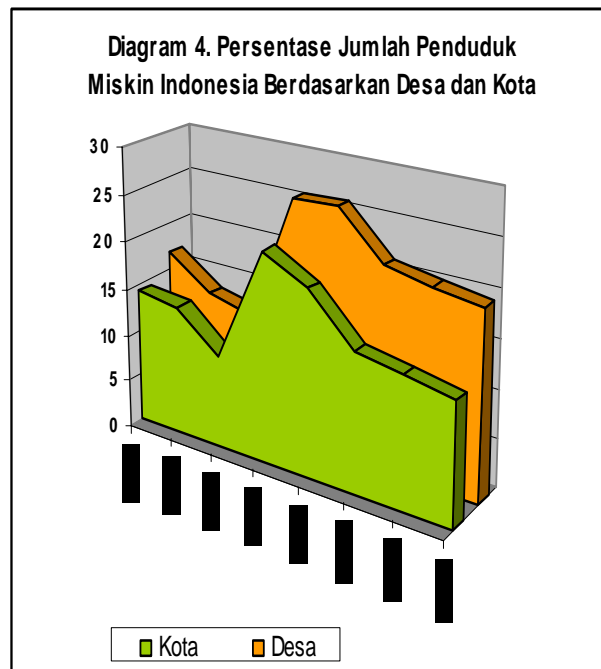
Meskipun proporsi penduduk miskin secara nasional mengalami penurunan, namun masih terjadi kesenjangan antardaerah dalam pembangunan manusia (IPM) dan pemenuhan terhadap beberapa hak dasar (IKM), sebagaimana ditunjukkan pada *Gambar 1*.



Sumber : BPS, Tahun 2003

Tantangan lainnya adalah *kesenjangan antara desa dan kota. Proporsi penduduk miskin di perdesaan relatif lebih tinggi dibanding di perkotaan. (Lihat Diagram 4)*. Data Susenas (*National Socio Economic Survey*) 2004 menunjukkan bahwa sekitar 69,0 persen penduduk di perdesaan termasuk miskin, dan sebagian besar bekerja di sektor pertanian.

Selain itu, tantangan lainnya adalah *kemiskinan yang dialami oleh kaum perempuan* yang ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta masih rendahnya angka Indeks Pembangunan Gender (*Gender-related Development Index, GDI*) dan angka Indeks Pemberdayaan Gender (*Gender Empowerment Measurement, GEM*).



Sumber : BPS, Berbagai Tahun

Tantangan lain adalah otonomi daerah yang berdampak pada *meningkatnya peran pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan*, sehingga peran daerah sangat penting untuk keberhasilan penanggulangan kemiskinan secara nasional terutama dalam hal mendekatkan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Kebijakan dan Program

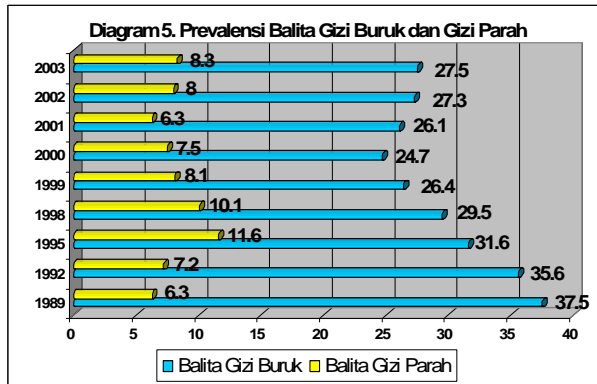
Upaya pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan Indonesia telah dilakukan dan menempatkan *penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama kebijakan pembangunan nasional*. Kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004–2009 dan dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun serta digunakan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan tahunan. Berbagai kebijakan dalam RPJM 2004 – 2009 diharapkan dapat menurunkan persentase penduduk miskin menjadi 8,2 persen pada tahun 2009.

Sebagai wujud gerakan bersama dalam mengatasi kemiskinan dan mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK)/ (National Strategy for Poverty Reduction) telah disusun melalui proses partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan di Indonesia. SNPK menggunakan pendekatan berbasis hak (*right-based approach*) sebagai pendekatan utama dengan menegaskan adanya pencapaian secara bertahap dan progresif (*progressive realization*) dalam penghormatan (*respect*), perlindungan (*protect*) dan pemenuhan (*fulfill*) hak dasar rakyat, memberikan perhatian terhadap perwujudan kesetaraan dan keadilan gender, serta percepatan pengembangan wilayah. *Selain itu, sekitar 60 persen pemerintah kabupaten/kota telah membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) dan menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai dasar pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan di daerah dan mendorong gerakan sosial dalam mengatasi kemiskinan*.

Langkah prioritas dalam jangka pendek, **pertama**, untuk mengurangi kesenjangan antardaerah antara lain dengan (i) penyediaan sarana irigasi, air bersih dan sanitasi dasar terutama daerah-daerah langka sumber air bersih; (ii) pembangunan jalan, jembatan, dan dermaga terutama daerah terisolasi dan tertinggal; (iii) redistribusi sumber dana kepada daerah-daerah yang memiliki pendapatan rendah dengan instrumen dana alokasi khusus (DAK). **Kedua**, untuk perluasan kesempatan kerja dan berusaha dilakukan melalui: bantuan dana stimulan untuk modal usaha terutama melalui kemudahan dalam mengakses kredit mikro dan UKM, pelatihan keterampilan kerja untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, meningkatkan investasi dan revitalisasi industri termasuk industri padat tenaga kerja, pembangunan sarana dan prasarana berbasis masyarakat yang padat pekerja. **Ketiga**, khusus untuk pemenuhan hak dasar penduduk miskin secara langsung diberikan pelayanan antara lain (i) pendidikan gratis bagi penuntasan wajib belajar 9 tahun termasuk bagi murid dari keluarga miskin dan penunjangnya; serta (ii) jaminan pemeliharaan kesehatan gratis bagi penduduk miskin di puskesmas dan rumah sakit kelas III.

Untuk mencapai ketiga langkah prioritas tersebut di atas, akan dikembangkan dalam budaya pembangunan di Indonesia adalah pemberdayaan masyarakat dan pelibatan peran aktif masyarakat terutama masyarakat miskinnya mulai dari perencanaan program pembangunan baik penentuan kebijakan dan penganggarannya, maupun pelaksanaan program serta monitoring dan evaluasinya.

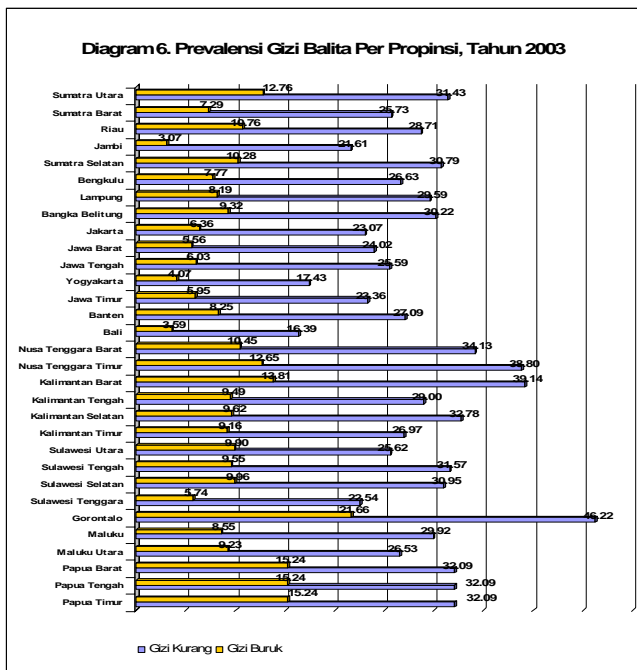
Target 2: Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya antara tahun 1990 – 2015



Sumber : BPS, Berbagai Tahun

Keadaan dan Kecenderungan

Prevalensi balita kurang gizi menunjukkan penurunan dalam kurun waktu 1989–2000, dan sedikit meningkat pada periode 2001–2003 (lihat Diagram 5). Persentase anak balita yang termasuk kategori gizi kurang dan parah umumnya meningkat dari 24,7 persen pada tahun 2000, menjadi 27,5 persen pada tahun 2003.



Sumber : BPS, Tahun 2003

Tantangan

Terjadinya *gizi buruk* pada balita antara lain karena kurangnya asupan gizi dan serangan penyakit infeksi. Faktor penyebab tidak langsung adalah rendahnya daya beli dan ketidaktersediaan pangan yang bergizi, keterbatasan pengetahuan tentang pangan yang bergizi terutama untuk ibu dan anak balita. Perbandingan persentase kecukupan gizi antarwilayah juga menunjukkan kesenjangan yang cukup tinggi (Diagram 6).

Kebijakan dan Program

Upaya mengatasi prevalensi balita gizi buruk dan balita gizi parah dilakukan antara lain melalui (1) *Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi,*

gangguan akibat kurang yodium, kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya, (2) Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi, (3) Pemberian subsidi pangan bagi penduduk miskin, (4) Peningkatan partisipasi masyarakat melalui revitalisasi pelayanan Posyandu, dan (5) pelayanan gizi bagi ibu hamil (berupa Tablet Besi) dan balita (berupa Makanan Pendamping ASI) dari keluarga miskin.

Keberhasilan kebijakan dan program ini di samping peran pemerintah juga tidak terlepas dari peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung dalam perbaikan gizi buruk dan balita gizi parah dari masyarakat miskin.